

MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS ISU-ISU KONTROVERSIAL DI MEDIA MASSA UNTUK MENINGKATKAN SIKAP DEMOKRASI MAHASISWA DAN IMPLIKASINYA BAGI MASYARAKAT MADANI

Ahmad Muhibbin dan Bambang Sumardjoko

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: achmad_muhibbin@ums.id

ABSTRACT

The study aims to describe 1) civics education learning in Higher Education in relation to democracy attitude and its implication to civilized community, 2) a model design of tentative civics education (PKn) learning, 3) a learning model of PKn as its reference, and 4) a model draft of PKn learning.

This research used a qualitative approach with case study pattern. The data gathering technique employed an in-depth interview, observation, and documentation. The data validation applied a triangulation technique, member checking and collegial/peer discussion. The data analysis used an interactive model.

The results of the study show that 1) the PKn learning has not been working on the students' democracy attitude development and its implication for a religious and civilized community so that it needs a paradigmatic dynamics of the learning in Higher Education. 2) the tentative model design include (a) the lecturers presented the controversial issues with the video/slide, (b) they explained the students about various problems, (c) they evaluated what the students has understood and has not understood about them, (d) they developed an alternative solution with small groups, (e) each group presented the results of discussion, (f) they developed the materials that would be learnt more deeply and facilitated based on the concepts stated by each group; (g) they concluded and closed the learning activity. 3) The model of controversial issues-based PKn learning was modified with active learning. 4) The model draft intended to the students' democracy attitude development and its implication to civilized community covers (a) a-perception, (b) the groups' presentation by discussing the controversial issues, (c) class discussion with active learning modification, (d) confirmation, and (e) closing.

Keywords: *learning; civics education; democracy attitude; civil society*

PENDAHULUAN

Secara teoretik, PKn dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat *konfluen* atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Secara programatik, PKn dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*)

dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari (Budimansyah, 2008: 24). Berdasarkan kompetensi yang perlu dikembangkan maka terdapat tiga komponen utama yang perlu dipelajari dalam PKn, yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions*.

Watak kewarganegaraan adalah sikap dan kebiasaan berpikir warganegara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. Sebagaimana dikemukakan Quigley dkk (1991), *civic disposition* adalah

“...those attitudes and habit of mind of the citizen that are conducive to the healthy functioning and common good of the democratic system”. Secara konseptual *civic disposition* meliputi sejumlah karakteristik kepribadian, yakni “*Civility (respect and civil discourse), individual responsibility, self-discipline, civic-mindedness, open-mindedness (openness, skepticism, recognition of ambiguity), compromise (conflict of principles, compassion, generosity, and loyalty to the nation and its principles*” (Quigley, Buchanan, dan Bahmueller, 1991: 13-14).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) yang berpusat pada masalah (*issue-centered education*) dan berada dalam kerangka filsafat rekonstruksionisme. Carole L. Hahn (Shaver, 1991: 470) menyatakan “*Social Studies educators have long asserted that studying and discussing issues is important to democracy*”. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan membelajarkan siswa untuk mampu memecahkan masalah-masalah sosial, dan isu-isu kontroversial kebijakan publik, berada pada tradisi *reflektif inquiry*.

Tradisi “*Social Studies Taught as Reflective Inquiry*” merupakan pembelajaran yang menekankan pengembangan warganegara yang baik dengan kriteria yaitu dilihat dari kemampuannya “...to engage in a continual process of clarifying process of clarifying their own value structure” (Barr dkk, 1978: 27). tujuan utama dari tradisi ini adalah “...the enhancement of the students’ decision making abilities, for decision making is the most important requirement the students’ decision making abilities, for decision making is the most important requirement of citizenship in a political democracy” (Barr dkk, 1978: 111). Dengan kata lain tradisi ini memusatkan perhatian pada pengembangan karakter warganegara yang baik dengan ciri pokoknya mampu mengambil keputusan dalam konteks social-politik.

Penelitian ini mengangkat beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi

berkaitan dengan peningkatan sikap demokrasi dan implikasinya bagi masyarakat madani yang saat ini dilaksanakan.

2. Bagaimana desain model tentative pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis isu-isu kontroversial di media masa untuk peningkatan sikap demokrasi dan implikasinya bagi masyarakat madani yang layak dirujuk.
3. Bagaimana model pembelajaran pendidikan Kewarganegaraan berbasis isu-isu kontroversial di media masa untuk peningkatan sikap demokrasi mahasiswa dan implikasinya bagi masyarakat madani.
4. Bagaimana draf model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis isu-isu kontroversial di media masa untuk peningkatan sikap demokrasi dan implikasinya bagi masyarakat madani.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat *research and development* yang dilakukan secara bertahap dalam waktu dua tahun. Tahap pertama dilakukan pada tahun ke-1 (2015) dan tahap kedua dilakukan pada tahun ke-2 (2016). Penelitian tahap pertama merupakan landasan bagi pengembangan tahap selanjutnya atau tahap kedua. Dengan demikian rangkaian metode selama dua tahun ini merupakan satu kesatuan integral dalam memecahkan masalah pokok yang diteliti.

Pada tahun pertama, penelitian dilakukan untuk: (1) mengidentifikasi tujuan, materi, metode, media dan evaluasi pembelajaran PKn di perguruan tinggi berkaitan dengan peningkatan sikap demokrasi saat ini; (2) mengeksplorasi faktor penghambat dan faktor pendukung terhadap pembelajaran PKn yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi di Surakarta; (3) mengeksplorasi pemahaman dosen PKn di Surakarta dalam menangkap isu isu kontroversial di media masa; (4) mengeksplorasi kemampuan dosen dalam mengembangkan isu- isu kontroversial di media masa dalam pembelajaran PKn; (5) mengeksplorasi kemampuan dosen dalam membuat RPP model pembelajaran PKn

berbasis isu isu kontroversial di media masa; (6) mengembangkan draf model Pembelajaran PKn berbasis isu isu kontroversial di media masa untuk meningkatkan sikap demokrasi dan implikasinya bagi masyarakat madani; (7) mengembangkan draf panduan implementasi model.

Metode penelitian tahun pertama dilakukan dengan dua tahapan yakni: (a) penelitian penjelajahan (eksploratif) yang dilakukan secara langsung di lapangan, dan (b) melakukan penyusunan draf model pengembangan dengan cara *Focus Group Discussion* (FGD). Penelitian penjelajahan (*eksploratif*) dimaksudkan untuk mengungkap kedalaman mengenai model pembelajaran PKn yang selama ini dilaksanakan di Perguruan Tinggi di Surakarta. FGD dimaksudkan untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak yang terkait sebagai bahan utama menyusun draf model pembelajaran PKn berbasis isu isu kontroversial di media masa untuk mengembangkan sikap demokrasi mahasiswa dan implikasinya bagi masarakat madani

1. Penelitian Lapangan

Penelitian penjelajahan (eksploratif) dimaksudkan untuk menelusuri keberbagai sumber data yang ada, dengan langkah-langkah terencana guna mendapatkan data yang lengkap perihal pembelajaran PKn di Surakarta. Untuk menghimpun data ditempuh dengan menentukan: (1) sumber informan, (2) sumber tempat dan peristiwa, dan (3) sumber dokumentasi/ arsip yang ada.

Informan dalam penelitian ini meliputi mahasiswa dan dosen UMS, UNS, UNIVET, UNISRI, Sumber tempat dan peristiwa yang digunakan sebagai fokus informasi adalah Laboratorium PKn dan ruang pembelajaran PKn di kelas. Sumber lain yang dikaji adalah dokumentasi atau arsip-arsip yang terkait dengan Pembelajaran PKn di Perguruan Tinggi.

Pengumpulan data dengan: (1) wawancara mendalam, (2) pengamatan langsung, dan (3) analisis data dokumen/ arsip. Jalannya wawancara mendalam dilakukan

secara terbuka dan bebas, tidak terstruktur tapi terfokus pada masalah yang diteliti. Proses wawancara dilakukan secara *l u w e s* dengan menempatkan informan sebagai orang yang memahami masalah yang ditanyakan. Kebenaran hasil isi wawancara bersifat empirik. Untuk membantu pengumpulan data hasil wawancara dilengkapi dengan alat perekam. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi infomasi yang tidak terjangkau. Dengan demikian data hasil wawancara dapat terjaring secara lengkap.

Untuk merekam situasi dan peristiwa serta tempat selama peristiwa berlangsung, digunakan teknik catatan lapangan (*filed note*) maupun alat pemotret serta alam perekam audio visual. Hasil rekaman dapat dijadikan sebagai bahan pendukung dalam analisis data dan hasil wawancara. Untuk data-data yang berupa dokumen atau arsip maupun hasil studi pustaka dalam penelitian ini digunakan sebagai data pelengkap, setelah berbagai materi diseleksi dan dianalisis isinya. Dengan teknik seperti ini informasi dan data tentang model pembelajaran PKn di perguruan tinggi dapat dihimpun kemudian diidentifikasi, dikembangkan dan dijabarkan dalam deskripsi yang lengkap.

Validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi data dan triangulasi sumber. Selain itu juga dengan bantuan dari para ahli Teknologi Pembelajaran untuk memberi penilaian RPP PKn selama ini. Hal ini dimaksudkan untuk mempertajam dan untuk koreksi maupun untuk memperoleh masukan dan kritikan, sehingga data hasil infomasi benar-benar telah teruji kebenarannya.

Pengolahan data hasil penelitian eksploratif dilakukan dengan teknik analisis model interaktif (Miles dan Huberman, 1984). Analisis interaktif meliputi tahapan: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) sajian data, dan (4) verifikasi/ menarik kesimpulan. Analisis dilakukan terus menerus dari awal pengumpulan data sampai dengan betul-betul diperolehnya data hasil penelitian yang lengkap. Proses analisis terjadi secara interaktif, yang menguji antar komponen secara

siklus yang berlangsung dalam waktu cukup lama, sehingga diperoleh hasil penjelasan yang benar-benar tuntas dan mendalam.

2. Pengembangan

Langkah ini dilakukan atas dasar hasil temuan *eksploratif*, kemudian dikembangkan untuk mencari model pembelajaran PKn di perguruan tinggi berbasis isu-isu kontroversial di media masa untuk mengembangkan sikap demokrasi mahasiswa dan implikasinya bagi masyarakat madani melalui *Focus Group Discussion (FGD)*.

a. Focus Group Discussion (FGD)

Capaian yang diinginkan dengan metode FGD adalah untuk memperoleh masukan informasi dari berbagai pihak terkait tentang model Pembelajaran yang dikembangkan. Peserta FGD yang akan diajak untuk mengembangkan model adalah dosen Surakarta, Dinas terkait, dan pakar pendidikan. Peran peneliti dalam hal ini adalah memandu dan memfasilitasi, sehingga informasi dan gagasan untuk mengembangkan model pembelajaran PKn berbasis isu-isu kontroversial di media masa untuk meningkatkan kesadaran dan sikap demokrasi muncul dari para peserta FGD. Dengan pendekatan partisipatif mampu mewakili kepentingan dan keinginan berbagai pihak mengenai model pembelajaran yang akan dikembangkan. Melalui FGD model pembelajaran PKn berbasis isu-isu kontroversial di media masa untuk meningkatkan kesadaran dan sikap demokrasi mahasiswa, akan dimunculkan, dirumuskan, disusun, dilakukan dan diuji serta dinilai tingkat keefektifannya. Hal ini tergantung sejauh mana pihak peserta telah menyepakati untuk merumuskan model yang dikehendaki.

b. Perumusan dan Penyusunan Rancangan Model

Langkah perumusan ini dilakukan beberapa kali yang beranggotakan tim terpadu atas: tim peneliti, peserta FGD dan beberapa ahli yang terkait. Forum ini menetapkan dan merumuskan draf model Pembelajaran PKn berbasis isu

isu kontroversial di media masa untuk meningkatkan kesadaran dan sikap demokrasi mahasiswa dan implikasinya bagi masyarakat madani.

c. Output yang ingin dicapai

Output yang ingin dicapai pada tahun pertama ini adalah (1) diperolehnya data lengkap tentang pembelajaran PKn perguruan tinggi Surakarta saat ini, dan (2) Perangkat Pembelajaran model pembelajaran PKn berbasis isu-isu kontroversial di media masa untuk meningkatkan sikap demokrasi dan implikasinya bagi masyarakat madani; (3) Rancangan draf model pembelajaran PKn berbasis isu-isu kontroversial di media masa untuk meningkatkan sikap demokrasi mahasiswa dan implikasinya bagi masyarakat madani.

d. Outcome

Outcome yang diharapkan dari hasil penelitian tahun pertama ini adalah Draf Model Pembelajaran PKn berbasis isu-isu kontroversial di media masa untuk meningkatkan kesadaran dan sikap demokrasi mahasiswa dan implikasinya bagi masyarakat madani.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan selama ini

Pernyataan responden terkait dengan tujuan pembelajaran PKn di Perguruan Tinggi sangat variatif, setelah dilakukan pengkodean dan pengelompokan dapat disampaikan sebagai berikut: (a) mengembangkan partisipasi kewarganegaraan secara bertanggungjawab (*civic participation and civic responsibility*), (b) mengembangkan daya kritis yang berbudaya bagi mahasiswa; (c) mengembangkan sikap demokrasi mahasiswa; (d) memberikan pengetahuan tentang pendidikan nilai Pancasila dan PKn; (e) mengembangkan pemahaman mahasiswa tentang kewarganegaraan (*civic literacy*), (f) mengembangkan komunikasi sosial kultural kewarganegaraan (*civic engagement*); (g) mengembangkan penalaran kewarganegaraan (*civic knowledge*), (h) mengembangkan

pemecahan masalah kewarganegaraan (*civic skill and participation*), dan (i) pembentukan sikap nasionalisme bagi para mahasiswa.

Seluruh responden menyetujui bahwa PKn di Perguruan Tinggi bertujuan memantapkan mahasiswa sebagai warga negara yang cerdas dan baik (*to be smart and good citizen*). Warga negara yang cerdas dan baik tersebut dipahami oleh para dosen PKn sebagai berikut: (a) warga negara yang menguasai pengetahuan (*knowledge*); (b) memiliki keterampilan (*skills*), (c) mengembangkan sikap dan nilai (*attitudes and values*) dan dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Berbagai pendapat ini menunjukkan bahwa para dosen PKn di Surakarta memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap konsep dan tujuan PKn di Perguruan Tinggi.

Perlunya Dinamika Paradigmatik Pembelajaran PKn di Perguruan Tinggi. Sebagian responden masih ada yang beranggapan bahwa mengajar adalah suatu kegiatan atau upaya mentransfer pengetahuan yang dimiliki dosen kepada para mahasiswanya. Dalam pembahasan di FGD dinyatakan bahwa dengan paradigma tersebut, mahasiswa dianggap sebagai botol kosong belaka yang hanya sekedar menerima segala sesuatu hal yang diberikan dosen melalui "kegiatan belajar mengajar" (dosen mengajar, mahasiswa belajar). Situasi yang tercipta cenderung menjadikan mahasiswa pasif, tidak kreatif, dan bisa menjadi miskin inovasi. Menurut Margareth Balla dkk, sebagaimana dikutip Ramsden (1990: 20), konsep pembelajaran bukan lagi *teaching as telling or transmission* (mengajar sekedar untuk menyampaikan atau mentransmisikan ilmu pengetahuan) atau *teaching as organizing student activity*, tapi harus bergeser ke arah *teaching as making learning possible*. Saat ini, pembelajaran yang berorientasi pada potensi dan kebutuhan siswa (mahasiswa) menjadi perhatian utama ahli pendidikan (Talbert and McLaughlin, 1999: 3). Pendekatan pembelajaran yang menempatkan guru/dosen sebagai sentral kegiatan belajar-mengajar sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan. Sistem pendidikan mulai menempatkan siswa/

mahasiswa pada posisi 'diberdayakan' secara maksimal yaitu mendidik mereka berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya.

Peran Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan sikap demokrasi mahasiswa dan implementasinya bagi masyarakat madani

a. Pengembangan sikap demokrasi mahasiswa

Sebagian besar dosen pengampu Pendidikan Kewarganegaraan yang diwawancarai menyatakan bahwa negara Indonesia harus menghindari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu mata kuliah ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengembangkan sikap demokratis mahasiswa. Proses pembelajaran tidak mendorong kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Hal ini disebabkan karena: (a) materi-materi yang diajarkan cenderung verbalistik atas nilai-nilai moral Pancasila sebagai civic virtues; (b) model pembelajarannya cenderung berbentuk hafalan kognitif. Akibatnya proses pembelajaran menimbulkan kejenuhan, karena materi yang diajarkan cenderung monoton, teoretik, kognitif, bahkan verbalistik (Samsuri, 2010: 130).

b. Unsur Penopang Demokrasi

Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik jika beberapa penopang demokrasi tidak kuat. Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tata kehidupan sosial dan sistem politik sangat tergantung pada tegaknya unsur penopang demokrasi itu sendiri. Unsur-unsur yang dapat menopang tegaknya demokrasi antara lain: (a) Terciptanya Negara Hukum; (b) terwujudnya Masyarakat Madani; (c) terwujudnya Infrastruktur Politik yang baik; dan (d) Pers yang Bebas dan Bertanggung jawab.

Dalam FGD dinyatakan bahwa istilah negara hukum sebagai terjemahan dari *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsepsi

negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan penjaminan hak asasi manusia. Istilah *rechtsstaat* dan *the rule of law* yang diterjemahkan menjadi negara hukum menurut Moh. Mahfud MD pada hakikatnya mempunyai makna berbeda, istilah *rechtsstaat* banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law*, sedangkan *the rule of law* banyak dikembangkan di negara-negara Anglo Saxon yang bertumpu pada *common law*. *Civil law* menitik beratkan pada *administratiom law*, sedangkan *common law* menitik beratkan pada *judical*. (Padmo Wahyono dalam Rosyada,2003).

Masyarakat madani (*civil society*) mensyaratkan adanya *civic engagement* yaitu keterlibatan warga negara dalam asosiasi-asosiasi sosial, *civic engagement* ini memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka, percaya dan toleren antarsatu dengan lain yang sangat penting artinya bagi bangunan politik demokrasi (Saiful Mujani; 200). Menurut Gellner (Azra, 2003: 117), masyarakat madani bukan merupakan syarat penting atau prakondisi bagi demokrasi semata, tetapi tatanan nilai dalam masyarakat madani seperti kebebasan dan kemandirian juga merupakan sesuatu yang inheren baik secara internal (dalam hubungan horizontal yaitu hubungan antar sesama warga negara) maupun secara eksternal (dalam hubungan vertikal yaitu hubungan negara dan pemerintahan dengan masyarakat atau sebaliknya). Sebagai perwujudan masyarakat madani secara kongkrit dibentuk berbagai organisasi-organisasi di luar negara yang disebut dengan nama NGO (non goverment organization) yang di Indonesia dikenal dengan naman lembaga swadaya masyarakat (LSM). Masyarakat madani dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai mitra dan partner kerja lembaga

eksekutif dan legislatif serta yudikatif juga dapat melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan kerja lembaga tersebut. Dengan demikian masyarakat madani menjadi sangat penting keberadaannya dalam mewujudkan demokrasi.

2. Model Tentative Pembelajaran PKn Berbasis isu-isu kontroversial di Media Masa untuk mengembangkan sikap demokrasi mahasiswa dan implikasinya bagi masyarakat madani.

a. Alasan pertimbangan

Dari berbagai hasil wawancara dapat ditarik benang merahnya bahwa perlu diupayakan adanya pengembangan model pembelajaran PKn. Melihat berbagai pertimbangan yang ada Pembelajaran PKn berbasis isu-isu kotroversial di media masa sangat mungkin untuk dijadikan model dengan alasan: (a) Banyak materi yang masih mengandung kontroversi dalam pembelajaran PKn khususnya menyangkut peran lembaga-lembaga Negara dan partisipasi warganegara dalam pemerintahan; (b) Melalui pembelajaran isu-isu kontroversial akan menumbuh kembangkan dan melatih kemampuan berpikir kritis mahasiswa; (c) Menumbuh kembangkan sikap demoratis, karena itu proses pembelajaran akan berdampak pada peningkatan ketrampilan sosial, sikap empati dan toleransi dan penghargaan pada perbedaan gender, ras dan golongan, yang pada akhirnya menumbuhkembangkan sikap saling menghargai adanya perbedaan dalam realitas sosial mahasiswa.

b. Harapan keunggulan model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan sikap demokrasi mahasiswa dan implikasinya bagi masyarakat madani.

Pembahasan dalam forum FGD dinyatakan bahwa keunggulan model yang akan dikembangkan adalah:

- 1) Salah satu aspek pendidikan PKn adalah demokrasi dan

pentingnya pengaruh utama dimensi ethics. Implementasi model yang akan dikembangkan akan mengantarkan peserta didik memiliki kepedulian sosial dan sikap empatik terhadap orang-orang yang berada di luar margin sosial, budaya dan agama peserta didik, atau yang sering disebut sebagai *outsider's*;

- 2) Melalui pembelajaran PKn berbasis isu-isu kontroversial akan mengembangkan kemampuan berfikir kritis (*Critical thinking*), pengembangan pribadi siswa (*social studies as personal development of the individual*), dan membekali kemampuan siswa dalam pengembangan diri melalui berbagai ketrampilan sosial dalam kehidupannya (*social life skill*);
- 3) Model yang dikembangkan dengan pembelajaran *Problem based Learning* (PBL) dan *Value Clarification Technique* (VCT), akan menumbuhkembangkan kemampuan berfikir kritis, kepekaan sosial dan mengajarkan "*ethical relativism*". Implementasi model akan berpengaruh terhadap tumbuhnya kesadaran toleransi dalam menyikapi perbedaan. Proses klarifikasi nilai akan menjadikan semangat "*equal in creation*" (sederajat dalam penciptaan) dan *common goal* untuk kesejahteraan bersama sebagai *core values*;
- 4) Model pembelajaran yang dikembangkan bersifat multidimensi dan multidisiplin, dan mampu membekali transfer ilmu pengetahuan, peresapan nilai-nilai dan akhlak dalam

ranah praktik, sehingga menumbuhkembangkan kearifan pengetahuan, kesadaran sikap dan perilaku (*mode of action*) peserta didik terhadap keragaman. Proses tersebut akan menghasilkan *Outcome* peserta didik memiliki kemampuan bertenggang rasa dalam kerangka *co-existence*, dan lebih jauh mampu berpartisipasi dalam menciptakan relasi sosial yang *pro-existence* dalam kemajemukan sosial, budaya dan agama di Indonesia.

Untuk memperlancar proses pembelajaran PKn berbasis pada isu-isu kontroversial di media massa harus selalu mencari informasi faktual dan aktual dari media cetak maupun media elektronik. Berita yang ada pada surat kabar, majalah, tabloid, internet, dan televisi sangat mendukung pembelajaran ini, tinggal menyesuaikan dengan topik bahasan yang akan disampaikan. Tayangan televisi pada beberapa acara, termasuk film yang kontroversial dengan harapan/idealita yang ada pada teks book dapat dijadikan media pembelajaran yang menarik untuk disimak, diamati, dan kemudian dikaji secara bersama di dalam kelompok.

3. Model tentative pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis isu-isu kontroversial di media masa untuk meningkatkan sikap demokrasi mahasiswa dan implementasinya bagi masyarakat madani

Forum FGD menyatakan bahwa agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan bisa mencapai hasil optimal dan dapat meningkatkan sikap demokrasi mahasiswa perlu dilakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut: (a) dosen mengawasi proses pembelajaran dengan membangun komitmen bersama (kontrak belajar); (b)

dosen mengembangkan persepsi yang benar mengenai materi yang dikaji (*concept map*); (c) dosen melakukan *on the spot assessment*: pelajari perilaku, sikap, pengetahuan, dan pengalaman mahasiswa; (d) dosen melakukan *Immediate learning involvement*: menciptakan perhatian dan minat awal pada mata kuliah, terkait dengan pokok bahasan, atau materi yang dikaji; (e) dosen melakukan *team building* untuk menciptakan mahasiswa menjadi lebih terbiasa satu sama lain sekaligus menciptakan semangat kerjasama dan interdependensi (*reciprocity*). *Reciprocity* merupakan suatu kebutuhan manusia yang dalam untuk merespon orang lain dan secara bersama-sama dengan mereka terlibat dalam mencapai tujuan. *Reciprocity* juga merupakan sumber motivasi yang memperlancar mengalirnya stimulasi untuk belajar; (f) dosen mengembangkan situasi pembangkit motivasi

Pembahasan pada Forum FGD dinyatakan bahwa ada beberapa hal yang bisa mengembangkan situasi pembangkit motivasi pada peserta didik, antara lain: (a) antusiasme dosen dalam proses pembelajaran; (b) dosen dapat menyampaikan jalinan hubungan antar materi yang jelas; (c) pengorganisasian materi yang baik; (d) menyusun materi dengan baik; (e) dosen menciptakan keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran; (f) keberagaman strategi yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran secara ideal dan dapat meningkatkan sikap demokrasi mahasiswa; (g) kedekatan hubungan antara dosen dan mahasiswa; (h) dosen sering memberikan contoh yang kongkrit dan bisa dimengerti

Di bawah ini disajikan beberapa contoh model pembelajaran PKn berbasis isu-isu kontroversial di media masa untuk meningkatkan sikap demokrasi mahasiswa dan implikasinya bagi masyarakat madani, dengan melakukan modifikasi strategi pembelajaran aktif. Tentunya dalam praktek pembelajaran yang sesungguhnya di kelas, dosen dapat mengimplementasikan dengan ragam variasi atau modifikasi seperlunya sesuai dengan karakteristik materi, kondisi

mahasiswa, sarana dan prasarana yang tersedia, serta berbagai pertimbangan objektif lain yang ada dan berkaitan langsung dengan proses pembelajaran, antara lain:

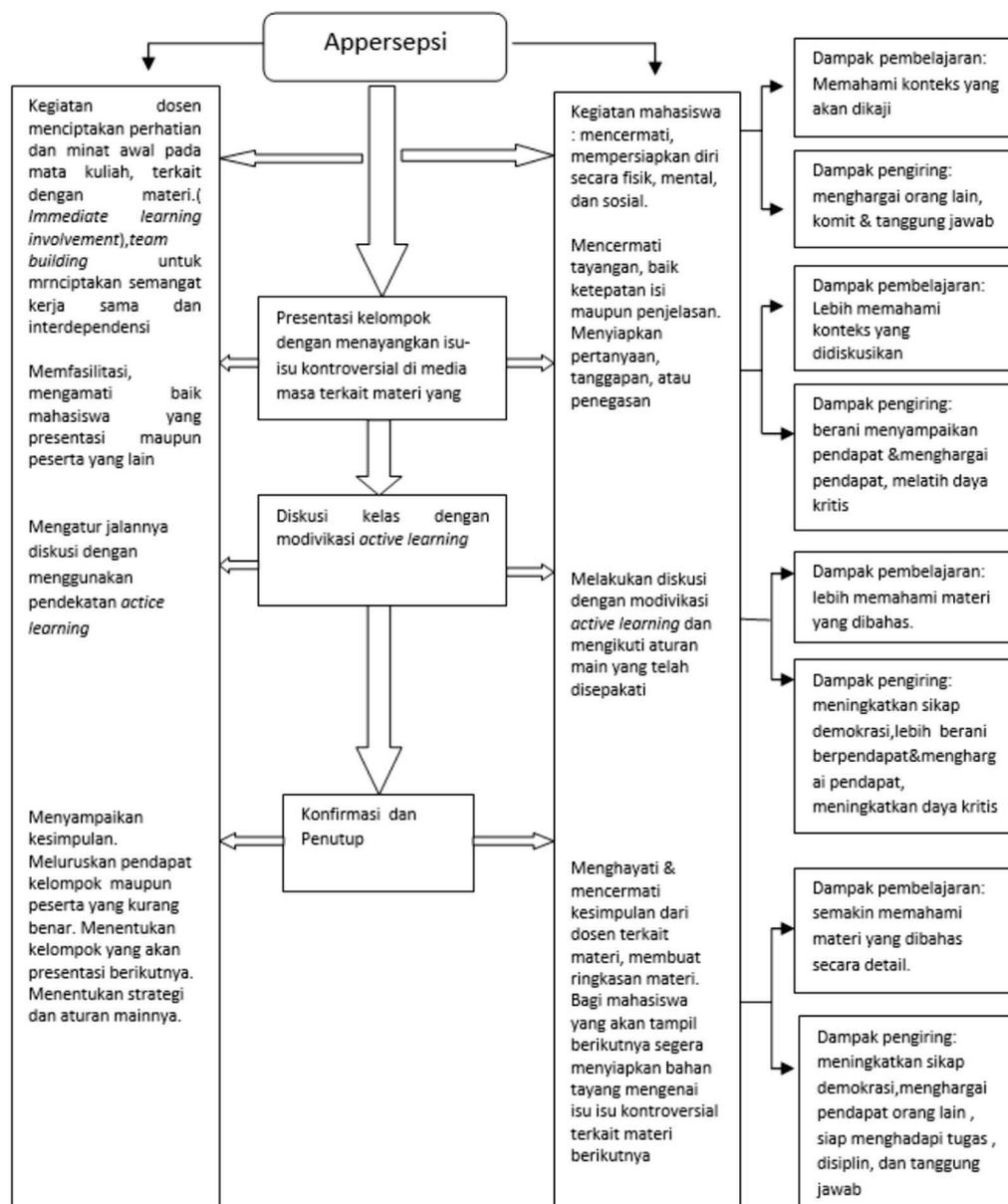
Model pembelajaran PKn berbasis isu-isu kontroversial di media masa dimodifikasi dengan *Everyone is a Teacher Here*; *Question Student Have*, *Reading Guide*; *Information Search*; *Answer Gallery* ; *Planted Questions* ; *The Power of Two*; *Snow Balling*; *True or False*; *Team Quiz* ; *Active Debate*; *Point-Counterpoint*; *Group to group exchange (small group discussion)*; *Carrousel*; *Student Teams Achievement Division (STAD)*; *Physical Self-Assesment*; *Group Investigation*; *Problem Based Learning*.

KESIMPULAN

1. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi sangat strategis dalam meningkatkan sikap demokrasi mahasiswa dan implikasinya bagi masyarakat madani. Namun realita di lapangan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran PKn belum ideal dalam mengembangkan sikap demokrasi mahasiswa dan implikasinya bagi masyarakat madani. Perlu ada dinamika paradigmatik pembelajaran PKn di Perguruan Tinggi dan unsur-unsur yang dapat menopang tegaknya demokrasi yang berimplikasi bagi terciptanya masyarakat madani.
2. Desain model tentative pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis isu-isu kontroversial di media masa untuk peningkatan sikap demokrasi dan implikasinya bagi masyarakat madani. Pada awalnya model ini didesain sebagai berikut: (a) dosen melakukan presentasi dengan menayangkan video/ slide yang berisi isu kontroversial di media masa terkait dengan materi yang akan dikaji; (b) dosen memberikan orientasi tentang berbagai permasalahan kepada mahasiswa; (c) dosen mengorganisasi apa yang telah diketahui dan apa yang tidak diketahui mahasiswa atas

- permasalahan yang diajukan; (d) dosen mengembangkan alternatif pemecahan dengan melibatkan kelompok-kelompok kecil; (e) masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya; (f) dosen mengembangkan materi yang akan dipelajari lebih lanjut dan mendalam serta memfasilitasi pembelajaran berdasarkan konsep-konsep yang diajukan oleh setiap kelompok dalam laporannya; (g) dosen menyampaikan kesimpulan dan menutup pembelajaran.
3. Model pembelajaran pendidikan Kewarganegaraan berbasis isu-isu kontroversial di media masa untuk

- peningkatan sikap demokrasi mahasiswa dan implikasinya bagi masyarakat madani yang layak dirujuk dengan melakukan modifikasi pembelajaran yaitu Model pembelajaran PKn berbasis isu-isu kontroversial di media masa dimodifikasi dengan *active learning* sebagaimana hasil kesimpulan dari FGD yang telah dilakukan.
4. Draf model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis isu-isu kontroversial di media masa untuk peningkatan sikap demokrasi dan implikasinya bagi masyarakat madani.



Model Pembelajaran Berbasis IKONmedMas

SARAN

1. Bagi dosen pengampu mata kuliah PKn hendaknya melakukan perbaikan pembelajaran, mulai dari pembuatan perencanaan, proses pembelajaran, pengembangan bahan ajar yang dapat meningkatkan sikap demokrasi mahasiswa dan implikasinya bagi masyarakat madani.
2. Bagi mahasiswa hendaknya meningkatkan partisipasi aktif dalam proses pembelajaran PKn sehingga sikap demokrasi dapat meningkat dan implikasinya pada masyarakat madani
3. Bagi asosiasi dosen PKn dan pengelola MKU hendaknya melakukan perubahan yang mengarah pada peningkatan kualitas pembelajaran PKn sehingga dapat meningkatkan sikap demokrasi mahasiswa dan implikasinya bagi masyarakat madani.

DAFTAR PUSTAKA

- Budimansyah, Dasim & Suryadi, Karim. (2008). *PKn dan Masyarakat Multi-kultural*, Prodi PKn-Sekolah Pascasarjana–UPI Bandung: Bandung.
- Budi, Winarno. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta. Media Press,
- Azra, Azumardi. 2003. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenata Media
- Budiardjo, Miriam, 1983, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Bahmueller, C. F. 1997. *A Framework For Teaching Democratic Citizenship : An International Project In The International Journal of Social Education*, 12,2
- Barr, R. D., Barth, J. L., & Shermis, S.S. (1978). *The nature of the social studies*. Palm spring: An ETS Publication
- Miles, B., & Huberman, a. M. 1984. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications.
- Mujani, Saiful: 2001. *Masyarakat Madani (Civil Society)*. <https://Hapidzcs.wordpress.com/Category/Makalah/Pancasila/Page/2/>
- Quigley, C. N., Buchanan, Jr. J. H., Bahmueller, C. F. (1991) *Civitas : A Framework for Civic Education*. Calabasas : Center for Civic Education
- Rosyada.Dada. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media
- Samsuri. 2009. Objektivikasi Pancasila sebagai Modal Sosial Warga Negara Demokratis dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Acta Civicus*. Vol. 2 (2). Bandung: UPI
- Talbert, J.E. & McLaughlin, M.E. 1999. "Understanding Teaching in Context" dalam *Educational Leadership* Vol. 57 (3).